

PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MENYIKAPI HOAKS

Anggita Kirani Tri Septia¹, Tri Indah Prasasti², Sri Ulina Br Sembiring³, Annisa Fadillah⁴, Ernita Siburian⁵, Hikmah Tiar Simanjuntak⁶, Hotlamida Panggabean⁷, Syahria Wahda⁸
anggitakrni.2242111004@mhs.unimed.ac.id¹, triindahprasasti@unimed.ac.id²,
ulisembiring@unimed.ac.id³, annisaf.2241111021@mhs.unimed.ac.id⁴,
ernita.2243111108mhsunimed@gmail.com⁵, hikmahtiar.2242111003@mhs.unimed.ac.id⁶,
hotlamida.2241111024@mhs.unimed.ac.id⁷, syahriawahda.2241111026@mhs.unimed.ac.id⁸

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran literasi digital dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi penyebaran hoaks di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis fenomena hoaks melalui studi pustaka terhadap jurnal, artikel, dan dokumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, politik, dan budaya. Literasi digital berperan penting sebagai filter informasi agar masyarakat mampu menilai kebenaran sumber, sementara berpikir kritis membantu menguji logika dan bukti sebelum menyebarkan informasi. Temuan penelitian menekankan bahwa penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis harus didukung oleh regulasi hukum, kolaborasi lintas sektor, serta pendidikan yang terintegrasi sejak dini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tangguh menghadapi derasnya arus informasi palsu di era digital.

Kata Kunci: Literasi Digital, Berpikir Kritis, Hoaks, Media Digital, Disinformasi.

ABSTRACT

This research discusses the role of digital literacy in enhancing critical thinking skills to address the spread of hoaxes in Indonesia. Using a descriptive qualitative method, the study analyzes the hoax phenomenon through a literature review of journals, articles, and digital documents. The findings reveal that hoaxes are not merely a technological issue but also affect social, political, and cultural aspects. Digital literacy serves as an essential filter for evaluating the authenticity of information sources, while critical thinking enables individuals to assess logic and evidence before disseminating information. The study highlights that strengthening digital literacy and critical thinking skills must be supported by legal regulations, cross-sector collaboration, and integrated education from an early stage. Thus, society will become more resilient in facing the rapid circulation of false information in the digital era.

Keywords: Digital Literacy, Critical Thinking, Hoax, Digital Media, Disinformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal akses dan penyebaran informasi. Literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting karena tidak hanya mencakup keterampilan teknis mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga kemampuan kognitif, sosial, dan etika dalam memanfaatkan informasi. Rendahnya literasi digital di masyarakat membuat banyak individu mudah terjebak pada informasi palsu, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial, politik, hingga ekonomi.

Di sisi lain, kemampuan berpikir kritis juga berperan penting dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Berpikir kritis memungkinkan individu untuk menilai kebenaran, relevansi, serta logika suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kemampuan ini masih relatif rendah

di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini semakin memperbesar potensi penyebaran hoaks yang dapat merusak kohesi sosial dan menurunkan kepercayaan publik.

Kasus hoaks seperti potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimanipulasi hingga seolah menyebut guru sebagai “beban negara” menunjukkan betapa berbahayanya disinformasi digital. Hoaks tersebut tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menimbulkan keresahan, polarisasi, dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang tangguh menghadapi hoaks di era digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena penyebaran hoaks secara rinci tanpa manipulasi variabel. Hanyfah dkk. (2022) menekankan metode ini cocok untuk mendeskripsikan permasalahan nyata melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hal serupa dilakukan Banjarnahor et al. (2024) yang menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis bahan ajar BIPA bermuatan budaya lokal secara naratif. Wiksana (2021) juga menegaskan bahwa metode ini membantu peneliti memahami fenomena komunikasi secara utuh tanpa uji hipotesis, sehingga relevan digunakan dalam penelitian hoaks.

Sumber data terdiri dari data primer berupa dokumen asli hoaks (teks, catatan digital, laporan) dan data sekunder dari literatur ilmiah, artikel, jurnal, serta dokumen digital. Jenis data yang digunakan sepenuhnya bersifat kualitatif untuk mendukung analisis fenomena. Hal ini sesuai dengan prinsip metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial (Wiksana, 2017).

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen digital terkait hoaks. Teknik ini dipandang sesuai karena memberi pemahaman komprehensif dari berbagai sumber tertulis. Hanyfah et al. (2022) menegaskan studi pustaka memperkuat hasil penelitian dengan referensi teoritis, sementara Wiksana (2017) menambahkan bahwa teknik ini mendukung analisis kualitatif melalui beragam pandangan ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tiga tahap: pengorganisasian data, identifikasi tema, dan interpretasi makna. Fokus analisis meliputi pola penyebaran hoaks, dampak sosial, dan strategi literasi informasi. Menurut Hanyfah et al. (2022), analisis deskriptif kualitatif memaknai data apa adanya tanpa manipulasi, sedangkan Wiksana (2017) menegaskan pentingnya analisis ini untuk menggambarkan fenomena sosial secara utuh dan menemukan makna yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hoaks di Indonesia

Penyebaran hoaks di Indonesia telah menjadi fenomena yang bersifat sistemik dan kompleks. Hoaks tidak lagi sekadar kesalahan informasi yang muncul sesekali, tetapi telah berkembang menjadi arus informasi palsu yang memanfaatkan struktur teknis dan sosial media untuk menjangkau publik secara luas. Penelitian Sarjito (2021) menunjukkan bahwa hoaks memiliki potensi mengancam ketahanan nasional karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan memecah kohesi sosial, terutama ketika dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau propaganda.

Perubahan bentuk dan modalitas hoaks menjadi perhatian penting dalam studi komunikasi digital. Rahmadhany et al. (2021) menemukan bahwa hoaks kini tidak hanya muncul dalam bentuk teks berantai, tetapi juga dalam bentuk gambar manipulatif, video

potongan, dan ujaran kebencian (hate speech). Bentuk-bentuk ini lebih mudah memicu emosi dan mempercepat penyebaran informasi palsu. Penelitian mereka juga melaporkan bahwa tingkat penyebaran hoaks melalui aplikasi percakapan (seperti WhatsApp) mencapai 62,8%, sedangkan melalui situs web sebesar 34,9%. Tingginya angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam moderasi dan deteksi konten bermuatan hoaks.

Analisis terhadap data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) memperkuat gambaran ini. Hoaks yang tersebar melalui WhatsApp selama 2015–2020 didominasi isu politik dan isu keseharian. Pola ini menunjukkan bahwa hoaks sering kali berawal dari ruang privat (grup percakapan tertutup) sebelum menyebar ke ruang publik. Pada masa pandemi COVID-19, jenis hoaks yang paling berbahaya berbentuk fabricated content (narasi yang sepenuhnya dibuat-buat), terutama terkait vaksin dan obat tradisional, yang berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan.

Menurut berbagai ahli komunikasi, faktor utama penyebaran hoaks antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, sifat platform digital yang tertutup, serta motif politik, ekonomi, atau sensasional yang mendorong produksi informasi palsu secara terorganisir maupun oportunistik. Karena itu, solusi penanganan hoaks perlu dilakukan secara lintas sektor melalui peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas fact-checking, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta penyedia platform digital.

B. Studi Kasus Hoaks “Viralitas Pernyataan Palsu Sri Mulyani”

Kasus hoaks yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang menyebut guru sebagai “beban negara” menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan teknologi digital untuk memanipulasi opini publik. Video yang beredar luas di media sosial tersebut merupakan hasil potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB (7 Agustus 2025). Klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan serta hasil penelusuran lembaga fact-checking seperti Politeknik Tempo dan AFP menunjukkan bahwa video tersebut merupakan rekayasa digital (deepfake).

Mekanisme penyebaran hoaks dimulai dari akun Instagram @ewinkleeming dan dengan cepat menyebar ke berbagai platform lain seperti TikTok, X (Twitter), dan grup WhatsApp. MAFINDO mencatat bahwa video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dalam waktu singkat, menunjukkan betapa cepatnya informasi palsu dapat menyebar melalui ekosistem media sosial yang saling terhubung. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) turut mempercepat produksi dan penyebaran konten manipulatif semacam ini.

C. Dampak Sosial yang Ditimbulkan

1. Keresahan dan Perasaan Tersinggung di Masyarakat

Penyebaran hoaks tersebut menimbulkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan guru dan tenaga pendidik. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) secara terbuka mengecam isi video yang dianggap merendahkan profesi guru. Dampak psikologis yang timbul meliputi penurunan semangat kerja dan perasaan tidak dihargai atas dedikasi mereka.

2. Polarisasi Opini dan Perpecahan Sosial

Hoaks yang tersebar luas menimbulkan polarisasi opini di masyarakat. Sebagian publik percaya pada kebenaran video tersebut, sementara sebagian lain meragukannya. MAFINDO menyebut bahwa penyebaran video ini memicu kemarahan publik dan memperkuat konflik persepsi terhadap figur pemerintah, memperdalam kondisi post-truth di masyarakat.

3. Kerusakan Reputasi Individu dan Institusi

Dampak langsung dari hoaks ini adalah kerusakan reputasi terhadap Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Meskipun klarifikasi telah diberikan, persepsi negatif sebagian

masyarakat tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa efek hoaks tidak berhenti setelah kebenaran diungkap, melainkan dapat meninggalkan jejak skeptisisme terhadap institusi publik.

4. Potensi Kerugian Ekonomi dan Sosial

Penanganan hoaks memerlukan alokasi waktu dan sumber daya yang besar, baik untuk klarifikasi maupun pemulihan reputasi. Selain itu, jika kepercayaan publik terganggu, pelaksanaan program pemerintah dapat terhambat. Secara tidak langsung, hal ini dapat memicu instabilitas sosial, menurunkan produktivitas, dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal.

Mafindo menegaskan bahwa penggunaan konten digital palsu dapat memperlebar jurang post-truth dan meningkatkan potensi intoleransi, radikalisme, serta menurunnya kepercayaan sosial.

D. Literasi Digital dan Kaitannya dengan Berpikir Kritis terhadap Berita Hoaks

Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting di era teknologi saat ini, khususnya dalam menghadapi maraknya berita hoaks. literasi digital bukan hanya sekadar bisa menggunakan internet atau media sosial, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari, memahami, serta menilai informasi dengan bijak. Dalam konteks melawan hoaks, literasi digital harus selalu berjalan seiring dengan kemampuan berpikir kritis, karena berpikir kritis adalah cara untuk menimbang, menganalisis, dan menyaring kebenaran dari setiap informasi yang ditemui.

Menurut para ahli, seperti Gilster (1997), literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Hal ini dikuatkan oleh Najla Amaly & Armiah (2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya dalam pemrosesan informasi, literasi data, dan berpikir kritis, menjadi faktor utama maraknya penyebaran hoaks di media sosial.

1. Membiasakan Sikap Hati-hati dalam Menerima berita

Literasi digital membantu kita agar tidak gampang percaya dengan setiap berita yang muncul di media sosial. Dengan berpikir kritis, kita dilatih untuk bertanya: Apakah berita ini masuk akal? Siapa yang menulisnya? Apa tujuannya?

Sikap hati-hati ini menjadi benteng pertama agar kita tidak langsung termakan oleh berita palsu. Hobbs (2010) menegaskan bahwa literasi digital mencakup keterampilan analitis untuk menilai akurasi dan kredibilitas informasi. Amaly & Armiah (2021) juga menekankan bahwa masyarakat yang kurang kritis cenderung langsung percaya tanpa melakukan pengecekan.

2. Melatih Kebiasaan Verifikasi dan Cek Fakta

Literasi digital mengajarkan cara memanfaatkan sumber terpercaya, seperti portal berita resmi atau lembaga pemerintah, untuk memverifikasi sebuah informasi. Berpikir kritis berperan dalam menilai apakah data yang ditemukan benar-benar relevan, lengkap, atau hanya dipelintir. Dengan kebiasaan cek fakta, kita bisa mematahkan hoaks sebelum menyebar lebih luas.

UNESCO (2018) menekankan bahwa literasi digital penting untuk memverifikasi informasi dari sumber kredibel. Amaly & Armiah (2021) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih lemah dalam kebiasaan verifikasi, sehingga menjadi celah utama tersebarnya hoaks.

3. Mengurangi Penyebaran Berita Bohong

Tidak semua hal yang kita baca harus disebarkan, apalagi jika belum jelas

kebenarannya. Berpikir kritis membantu kita mempertimbangkan dampaknya: Jika informasi ini ternyata hoaks, siapa yang akan dirugikan? Dengan cara ini, kita bisa lebih bertanggung jawab sebagai pengguna media.

Livingstone (2004) menyebutkan bahwa literasi digital juga berkaitan dengan etika digital, yakni tanggung jawab dalam berbagi informasi. Amaly & Armiah (2021) menambahkan bahwa perilaku berbagi informasi tanpa pertimbangan kritis mempercepat penyebaran hoaks.

4. Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Digital

Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tapi juga soal kesadaran. Dengan literasi digital kita belajar bahwa setiap informasi yang kita sebar punya konsekuensi. Berpikir kritis menuntun kita untuk tidak hanya ikut-ikutan atau terpengaruh emosi, tetapi mengambil keputusan berdasarkan logika dan bukti yang kuat.

Ribble (2015) dalam konsep digital citizenship menekankan bahwa literasi digital juga mencakup kesadaran moral. Amaly & Armiah (2021) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi penyebaran hoaks menjadi masalah serius.

5. Menumbuhkan Pola Pikir Analitis dan Reflektif

Hoaks seringkali sengaja dibuat dengan memanfaatkan emosi, seperti rasa takut, marah, atau benci. Literasi digital membantu kita memahami pola penyebaran informasi, sedangkan berpikir kritis melatih kita untuk tidak langsung bereaksi, melainkan menganalisis: Apa motivasi di balik berita ini? Mengapa berita ini muncul sekarang? Dengan begitu, kita bisa lebih tenang dan objektif dalam menyikapinya.

Ennis (2011) menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah proses sistematis dalam menganalisis argumen dan mengevaluasi bukti. Amaly & Armiah (2021) menegaskan bahwa masyarakat yang kurang analitis cenderung bereaksi cepat terhadap hoaks tanpa melakukan evaluasi.

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks di Indonesia terbukti sebagai fenomena kompleks yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, politik, dan budaya. Hoaks berdampak luas, mulai dari keresahan publik, polarisasi opini, hingga kerusakan reputasi individu maupun institusi. Literasi digital dan kemampuan berpikir kritis terbukti memiliki peran sentral dalam menghadapi masalah ini. Literasi digital membantu masyarakat untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak, sementara berpikir kritis memungkinkan masyarakat menilai kebenaran informasi berdasarkan bukti dan logika. Dengan sinergi keduanya, masyarakat dapat lebih siap menghadapi derasnya arus informasi palsu dan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya tahan.

Saran

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam membangun budaya literasi digital yang menyeluruh. Kedua, pendidikan literasi digital dan berpikir kritis perlu diintegrasikan sejak dini dalam kurikulum sekolah maupun kegiatan nonformal agar generasi muda memiliki kemampuan menyaring informasi dengan lebih baik. Ketiga, regulasi hukum harus ditegakkan dengan konsisten guna menekan penyebaran berita bohong, disertai edukasi tentang konsekuensi sosial dan hukum dari penyebaran hoaks. Keempat, masyarakat perlu dibiasakan dengan budaya cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Dengan strategi komprehensif tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan dan masyarakat akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaly, N., & Armiah, A. (2021). Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks dalam Media Sosial. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 43. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>
- Banjarnahor, L. E., Tarigan, P. E., Yanti, Y. R., Pangaribuan, R. L., Maulidiah, U., Siregar, M., & Prasasti, T. I. (2024). ANALISIS BAHAN AJAR BIPA BERMUATAN BUDAYA LOKAL DESKRIPTIF ANALYSIS OF BIPA TEACHING MATERIALS CONTAINING LOCAL CULTURE OF NORTH SUMATRA THROUGH A DESCRIPTIVE. 3226–3232.
- Cahyadi, I. R. (2020). Survei KIC: Hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses internet. *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com>
- Ennis, R. H. (2011). *The nature of critical thinking: An outline of critical thinking dispositions and abilities*. University of Illinois.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York, NY: Wiley.
- Halimah, H., Sembiring, S. U. B., & Damayanti, W. (2025). Character Sketching-Oriented Inductive Thinking Model in a Creative Writing Class (Issue Icollite 2024). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-438-9_13
- Hamdani M, Prayitno BA, & Karyanto P. (2019). Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Eksperimen. *Proceeding Biology Education Conference* 16(1), 16(Kartimi), 139–145.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarso, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristik (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. Washington, DC: Aspen Institute.
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51–66
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). The Phenomenon of the Spread of Hoaxes and Hate Speech on Social Media. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1 SE-Articles), 30–43. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/182>
- Rahmawati, D., Setyo Putro Robawa, R., Faiq Al Abiyyi, M., Daffa NRF, P., Ilman Nugraha, R., Puguh Margono, F., Praditya, Mi. A., & Sholihatin, E. (2023). Analisis Hoaks dalam Konteks Digital: Implikasi dan Pencegahannya di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10819–11082.
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. *International Society for Technology in Education*. https://archive.org/details/digitalcitizensh0000ribb_x4u3
- Rusdy, M. (2021). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks pada Remaja di SMA Negeri 7 Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pekommas*, 6(2), 77–84. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v6i2.4271>
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(2), 175–186.
- Sudoyo, W. (2024, 3 Januari). Kominfo tangani 1.615 isu hoaks selama 2023. *InfoPublik*. https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/813291/kominfo-tangani-1-615-isu-hoaks-selama-2023?utm_source=
- Syabaruddin, A., & Imamudin, I. (2022). Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Eduscience*, 9(3), 942–950. <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3447>
- TurnBackHoax. (2025, 19 Agustus). [SALAH] Video Sri Mulyani Sebut “Guru Itu Beban Negara”. <https://turnbackhoax.id/2025/08/19/salah-video-sri-mulyani-sebut-guru-itu-beban-negara/>
- UNESCO. (2018). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. Paris: UNESCO.

- Wiksana, W. A. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 121–131. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661>
- Yanti, N., Mulyati, Y., Sunendar, D., & Damaianti, V. (2021). Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Indonesia. *Diksa: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 59–71. <https://doi.org/10.33369/diksa.v7i1.22391>.